

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat petunjuk dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru Tahun 2020.

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi dan Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Sebagai salah satu unsur dari fungsi pembangunan sosial dan ekonomi, Dinas Sosial Kota Banjarbaru telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Tahun 2020 ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Dinas Sosial Kota Banjarbaru sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan..

Banjarbaru, Pebruari i 2021

**Plt. Kepala Dinas Sosial
Kota Banjarbaru**

Ir. H. FAHRUDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19611216 198903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		ii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Dasar Hukum	1
	1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
	1. Perda Pembentukan Dinas Sosial Kota Banjarbaru	2
	2. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Banjarbaru	2
	1.4 Aspek Strategis	5
	1.5 Isu Strategis	6
	1.6 Strategi dan Kebijakan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	2.1 Perjanjian Kinerja	9
	2.2 Pengukuran Kinerja	10
	2.3 Target Perjanjian Kinerja	10
	2.4 Perjanjian Kinerja Dengan Koneksitas Kegiatan dan Pagu Anggaran	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	12
	3.1 Capaian Kinerja Organisasi	12
	A. Kerangka Pengukuran Kinerja	12
BAB IV	PENUTUP	39
	4.1 Kesimpulan	39
	4.2 Langkah Dimasa Datang	39

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program dan kegiatan yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya.

Kedudukan Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Untuk menciptakan good governance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme. Maka dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 Dinas Sosial Kota Banjarbaru berdasarkan hukum dan peraturan

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

1.3 Gambaran Umum Organisasi

1. Peraturan Daerah Pembentukan Dinas Sosial Kota Banjarbaru

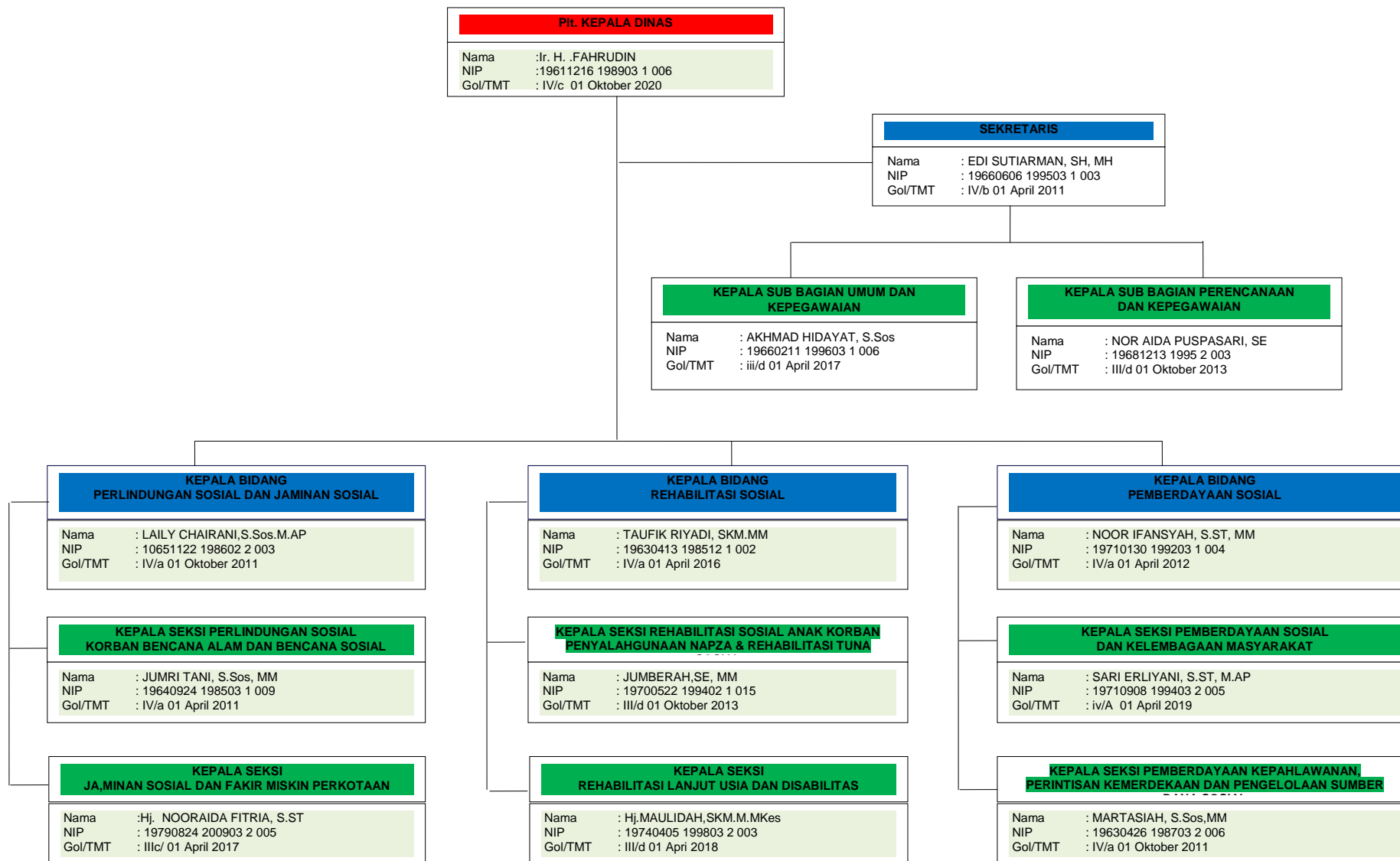
Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru diatur berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru .

2. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru, maka struktur Dinas Sosial terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Perlindungan Sosial dan Jaminan Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan bencana sosial
 - 2) Seksi Jaminan Sosial dan Fakir Miskin Perkotaan
 - d. Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Korban Penyalahgunaan Napza dan Rehabilitasi Tuna Sosial
 - 2) Seksi Rehabilitasi Lanjut Usia dan Disabilitas
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari :
 - 1) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan Masyarakat
 - 2) Seksi Pemberdayaan Kepahlawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai berikut :



1.4 Aspek Strategis

Dalam rangka mendukung dan mewujudkan visi Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu **“Mewujudkan Banjarbaru Sebagai Kota Pelayanan Yang Berkarakter”**, maka Dinas Sosial mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru

a. Tugas Pokok Dinas Sosial

Tugas pokok Dinas Sosial Kota Banjarbaru mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, Dinas Sosial Kota Banjarbaru mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Perumusan program dan kebijaksanaan teknis dalam bidang sosial sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial
3. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional pembinaan, pengaturan, pelaksanaan dan pelayanan sosial.
4. Perumusan dan penetapan kebijakan operasional, pembinaan, penagturan, pelaksanaan dan pelayanan kesejahteraan sosial
5. Pembinaan dan pengendalian unit pelaksana teknis dinas lingkup dinas sosial
6. Pengelolaan urusan kesekretariatan

b. Misi

Misi Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah :

- a. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial melalui peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia pelayanan
- b. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
- c. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui optimalisasi peran serta masyarakat dan potensi sumber daya sosial dalam penanganan masalah social

- d. Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui pembinaan kesejahteraan sosial penguatan karakter, moral iman dan akhlak

c. Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru

Tujuan Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang tertuang dalam RPJMD Pemerintah Kota Banjarbaru adalah :

Meningkatkan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Penanganan Penduduk Miskin berdasarkan data terpadu

1. Sasaran

Sasaran adalah penjabaran dan implementasi dari tujuan pada tatanan yang lebih baik dan terarah, terperinci dan operasional sasaran menggambarkan hal atau kondisi yang ingin dicapai melalui rangkaian kegiatan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif, jelas dan terukur.

Sasaran secara umum adalah tercapainya kesejahteraan yang merata untuk seluruh masyarakat Banjarbaru.

Sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- b. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam kesejahteraan social

1.5 Isu Strategis

Proses pelaksanaan tugas dan kewenangan Dinas Sosial Kota Banjarbaru dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal, faktor internal berupa kebijakan Pemerintah Kota Banjarbaru, dan sumber daya yang berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan pelayanan bidang sosial, sedangkan faktor eksternalnya adalah kebijakan pemerintah propinsi atau pemerintah pusat menyangkut pembangunan bidang sosial dan faktor lainnya diluar faktor internal.

Setelah menganalisa dokumen beberapa dokumen dan kebijakan Pemerintah Kota, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat dan menelaah ketersediaan sumber daya maka Dinas Sosial mengambil langkah dan strategi memanfaatkan faktor pendorong untuk mengoptimalkan pelayanan bidang kesejahteraan sosial.

Adapun isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru adalah :

1. Perkuatan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Permasalahan perkuatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu permasalahan yang perlu menjadi perhatian saat ini. Hal ini tidak lepas akibat dari masih sangat kurangnya sarana dan prasarana terutama dibidang pendidikan dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang merupakan faktor utama dari terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas.

2. Peningkatan pelayanan publik dan pelayanan pada fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial, bahwa seiring dengan perkembangan Kota Banjarbaru sebagai daerah yang mandiri dan berkarakter maka permasalahan sosial makin meningkat terutama penyandang masalah kesejahteraan sosial perlu antisipasi secara komprehensif terhadap persoalan tersebut.

3. Perbaikan kualitas pelayanan publik

Agenda utama yang perlu ditempuh adalah terwujudnya pemerintahan yang baik (good governance) yang sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang professional, kepastian hukum, transparan, partisipasif, akuntabel, memiliki kredibilitas bersih dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi rakyat, berkembangnya budaya perilaku birokrasi yang didasari etika, semangat pelayanan dan pertanggung jawaban publik serta integritas pengabdian dalam mengemban misi pembangunan daerah.

1.6 Strategi dan Kebijakan

Berdasarkan rumusan tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Sosial Kota Banjarbaru maka strategi yang dilaksanakan untuk pembangunan 5 (lima) tahun kedepan adalah melaksanakan perkuatan sumber daya manusia yang berkualitas dan professional, berakhlak mulia, sopan dan santun baik dalam kelompok sosial maupun pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan pembangunan kesejahteraan sosial dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas dalam penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial
2. Meningkatkan Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi aktif dalam Penanganan Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui organisasi sosial masyarakat (orsos), Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK) Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) Karang Taruna, Lembaga-lembaga Perlindungan sosial dalam pencegahan dan pelayanan serta rehabilitasi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial dan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)
3. Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat adalah dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan untuk keluarga miskin maupun perempuan rawan sosial ekonomi dan penyandang disabilitas
4. Meningkatnya kesiagaan perangkat dan kesadaran kemampuan serta tanggung jawab dalam usaha pencegahan dan pemulangan akibat bencana yang didukung oleh pengumpulan sumbangan sosial yang baik dari masyarakat.
5. Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi bagi penyandang cacat, anak terlantar dan korban narkoba, tuna sosial, anak putus sekolah melalui bimbingan mental serta keterampilan dalam panti maupun diluar panti, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta
6. Meningkatnya kemauan dan kemampuan anak terlantar keluarga fakir miskin keluarga berumah tidak layak huni, perintis kemerdekaan, keluarga pahlawan nasional serta untuk memperbaiki taraf hidup kesejahteraan sosialnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru.

Secara umum Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada tahun 2020 sudah melaksanakan program kegiatan sesuai dengan yang sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung jawab organisasi.

Dari sasaran yang telah ditetapkan belum semuanya mencapai target kinerja yang diharapkan.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebagai berikut :

**Tabel. 1
Perjanjian Kinerja
Dinas Sosial Kota Banjarbaru**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)	Realisasi (5)
1	Meningkatnya Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS yang berpartisipasi	75%	100%
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Miskin dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya dimasyarakat	59%	
		Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendorong pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	100%	100%
		Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	95%	

2.2 Pengukuran Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan / Form Perhitungan
1.	Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Cakupan Potensi PSKS yang berpartisipasi.	<p>Penjelasan : Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan , keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial</p> <p>Cara Pemilihan Indikator : Partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dipilih untuk menggali potensi masyarakat yang berpartisipasi dan dapat didayagunakan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Banjarbaru.</p> <p>Perhitungan : Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dibagi Jumlah PSKS dikali 100%</p>
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Miskin dalam Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat	<p>PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar)</p> <p>Penjelasan : PMKS perlu penanganan dan pelayanan, pembinaan serta rehabilitasi</p> <p>Perhitungan : Jumlah PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat dibagi jumlah PMKS dikali 100%</p>
		Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan dan pembinaan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	<p>Penjelasan : Masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar individu yang saling ketergantungan satu sama lain</p> <p>Perhitungan : Jumlah masyarakat yang mendapatkan bantuan sesuai ketentuan</p>
		Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan dan dan pelayanan untuk melaksanakan fungsi sosial di masyarakat	<p>PMKS adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (Jasmani, rohani dan sosial secara memadai dan wajar)</p> <p>Alasan pemilihan indikator PMKS perlu penanganan dan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi</p> <p>Cara perhitungan : Jumlah PMKS yang mendapat bantuan dibagi Jumlah PMKS dikali 100%</p>

2.3 Target Perjanjian Kinerja

Target Perjanjian Kinerja ditentukan dengan perhitungan capaian kinerja tahun sebelumnya yang direncanakan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Banjarbaru. Target yg diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

2.4 Perjanjian Kinerja dengan koneksitas kegiatan dan pagu Anggaran

Sasaran Strategis	Indikator		Anggaran
	Kinerja	Kegiatan	
Meningkatnya partisipasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Cakupan PSKS yang berpartisipasi.	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	627.410.000
		Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	915.000
		Pembinaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	121.190.000
		Pengumpulan, Pengolahan data, ekspose dan pelaporan	360.000.000
Meningkatnya Kemandirian masyarakat dalam kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat	Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	85.257.500
		Pengelolaan Rumah Singgah	228.398.700
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan	0
		Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional	4.032.000
	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan dan pembinaan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	Santunan Tali Asih kepada Masyarakat	464.500.000
		Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	52.806.000
	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	Pendampingan Program Keluarga Harapan	178.840.000
		Penyaluran Pangan bagi masyarakat miskin	10.710.000
		Pembinaan dan Rehabilitasi para lanjut usia (LANSIA)	56.886.000
		Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	30.965.000
		Pembinaan dan Rehabilitasi para gelandangan, pengemis dan orang terlantar	0
		Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba	0
		Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak di LKSA	54.803.500

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

A. Kerangka Pengukuran Kinerja

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup: kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Untuk mengukur kinerja yang obyektif, akurat dan terpercaya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing kegiatan, dimana untuk pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kinerja, menggunakan rumus:

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian Rencana} \\ \text{Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus:

$$\begin{array}{l} \text{Persentase Pencapaian Rencana} \\ \text{Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi-Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan **perbandingan** capaian kinerja sasaran strategis, antara **target** yang ditetapkan

pada **Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja**, dibandingkan dengan hasil **realisasi** semua kegiatan setelah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Pencapaian sasaran dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 85 s/d 100 % = **Sangat baik/sangat berhasil**
- 70 - < 85 % = **Baik/berhasil**
- 55 - < 70 % = **Cukup berhasil**
- < 55 % = **Tidak berhasil**

Pengukuran pencapaian kinerja juga dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan capaian kinerja sasaran strategis, antara realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun yang lalu; membandingkan realisasi dengan capaian kinerja yang sama dengan daerah lain; membandingkan dengan ukuran standar nasional / provinsi seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Pada Laporan Kinerja tahun 2020 adalah dengan menggunakan pengukuran kinerja organisasi . Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja

Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan wajib. Dalam melaksanakan tugas mengacu pada RPJMD Kota Banjarbaru dalam Misi 5 yaitu Memperkuat Cipta Kondisi Masyarakat Yang Aman, Nyaman dan Tertib dengan indikator Sasaran sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 1

MENINGKATNYA PARTISIPASI POTENSI dan SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL (PSKS) DALAM PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ***Indikator 1.***

Cakupan PSKS yang berpartisipasi

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Perseorangan , keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial

A. CAPAIAN KINERJA DINAS SOSIAL KOTA BANJARBARU

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dipilih untuk menggali potensi masyarakat yang berpartisipasi dan dapat di dayagunakan untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial di Kota Banjarbaru.

Capaian Indikator Sasaran Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) diukur berdasarkan perhitungan **Jumlah Jenis PSKS yang berpatisipasi dibagi Jumlah Jenis PSKS dikali 100%**.

Tabel 1.

Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Cakupan PSKS yang berpartisipasi	PSKS	75%	75%	100%

Realisasi Indikator Kinerja Cakupan PSKS yang berpartisipasi tahun 2020 terealisasi 75% (9 jenis PMKS) dari target 75% (9 jenis PMKS) maka capaian kinerja 100% kategori baik.

**Tabel. 2
PSKS Kota Banjarbaru**

No	PSKS	Jumlah	Nama dan Alamat	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pekerja Sosial Profesional	2 orang	Rizani Hersyah, S.Sos Yunistia Nurmalasari, S.Pd	aktif
2.	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	45 orang	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	aktif
3.	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	40 orang	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	aktif
4.	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	18 LKS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yayasan Kaganangan Banua Kompl Balitan Jaya Permai Jl. Brunai Balitra Jaya Permai Loktabat Utara 2. Yayasan Cita Anak Bangsa Jl Mistar Cokrokosumo Perum Graha Citra Mega Kelurahan Cempaka 3. Yayasan Tahfidz Sulaimaniyah Jl.Guntung Paring RT.036/07 Kelurahan Guntung Manggis 4. Yayasan Griya Pemberdayaan Jl.Abadi III RT.06/07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan . Landasan Ulin 5. Yayasan Raudatun Nasyi'in Jl. Mistar Cokrokosumo Bumi Barakat Kelurahan Sungai Besar Kec.Banjarbaru Selatan. 6. Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia Jl.A.Yani Banjarbaru Km.34 No.11C RT.01/01 Kec BBS 7. Yayasan Absi Surya Rahman Jl.Purnama No.31 Rt.01/06 Kelurahan Banjarbaru Utara 8. Yayasan Kharisma Kasih Bunda Jl.STM Komplek Palem Asri No. 1B Banjarbaru Kel.Komet Kec. BBU 9. Yayasan Al Aqsho Jl.Purnawirawan Rt.01 RW.01 kel.Palam Kec.Cempaka 10. Panti Asuhan Wiyata Kartika Jl.A.Yani Km.32,5 RT.13 Rw.06 Kel.Loktabat Utara kecamatan .Banjarbaru Utara 	<p>Aktif</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p>

			11. Panti Asuhan Akhlak Mulia Jl.A.Yani Km.28,5 Simpang Kuranji No.4 RT.35 RW.5 Kel.Guntung Manggis 12. Yayasan Sahabat Yatim Indonesia Jl.R.O.Ulin No.18A RT.02/02 Kel.Loktabat Selatan Kec.Banjarbaru Selatan 13. Yayasan Keluarga Kasih Setia Jl. Palapa I No.12RT04 RW.04 Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara 14. Yayasan Cahaya Madinah Jl.Mustika IV Blok D No.8 Karang Anyara Utara kec.Banjarbaru Utara 15. Panti Asuhan Tunas Kalimantan MALINGGANG Jl.Pondok Jeruk Kel.Loktabat Utara Kec.Banjarbaru Utara 16. Yayasan Berkah Insan Mulia Jl. Kebun Karet Komplek Ruko Griya Aditya No.2 Kel.Loktabat Utara Kec. Banjarbaru Utara 17. Yayasan Griya Yatim dan Dhuafa Jl.Taruna Praja Raya No. 75 RT.05/05 (JPOK) Kel.Mentaos Kec.Banjarbaru Utara 18. LKSA Asah Asih Asuh Jl. Abadi III Rt.06/07 Kelurahan Guntung Manggis Kecamatan landasan Ulin	Sda Sda Sda Sda Sda Sda Sda sda
5.	Karang Taruna (KT)	36 KT	Dinas Sosial Kota Banjarbaru	Aktif
6.	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	2 buah	LK3 Idaman Kota Banjarbaru	aktif
7	Penyuluh Sosial - Penyuluh Sosial Masyarakat	4 orang	- Pariman - Anita Qamariah - Astuti Iriani - Mauizatul Asmaniah	Aktif
8.	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5 Orang	- Iwan Moeryanto,SH - Pariman - Beny Agung Susanto,SE - Sugianoor - Rosita Juli Agustiani Devi, A.md. Kep	Land. Ulin BBU Cempaka LA BBS
9	Dunia usaha	7	Bank Kal-Sel, PT.Angkasapura I Syamnoor, BNI Syariah Banjarbaru, PDAM Intan Banjar, PT PLN Wilayah Kalsel, Hotel Q Mall Banjarbaru, PT. Surveyor Indonesia Cabang Banjarbaru.	

Sumber data Bidang Pemberdayaan Sosial Tahun 2020

Pada tahun 2020 Dunia Usaha berperan aktif dalam pembangunan Rumah Disabilitas Netra, dimana masing-masing Dunia Usaha membangun 1 (satu) buah rumah disabilitas dengan dana CSR

Selain itu pada tahun 2020 CSR dari PT.PLN juga memberikan bantuan berupa modal usaha dan Gadget untuk sarana belajar anak penerima manfaat serta memberikan paket sembako kepada masyarakat terdampak Covid 19 di 5 Kecamatan se Kota Banjarbaru sebanyak 500 paket

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Tahun 2020 Indikator Kinerja Cakupan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dengan realisasi capaian kinerja dua tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1	Cakupan PSKS yang berpartisipasi	66,7%	66,7%	75%	75%	75%	75%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi indikator Kinerja Cakupan PSKS yang berpartisipasi jika dilihat dari 2 (dua) tahun terakhir belum ada peningkatan .karena pada tahun 2018 yang berpartisipasi terealisasi 66,7%, dengan kategori cukup dan pada tahun 2019 dan tahun 2020 terealisasi 75% (9 PSKS) dari target (9 PSKS) kategori baik.

Pada tahun 2020 belum ada peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi karena pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020 ada refocusing anggaran sehingga untuk pelaksanaan pembinaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial tidak bisa terlaksana.

3. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten/ Kota/ Provinsi

Capaian Kinerja yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru jika dibandingkan dengan Kabupaten /Kota sebagai berikut :

Tabel 3.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Kab.Banjar	Realisasi Kab.Tala	Realisasi Kota Banjarmasin
1.	Cakupan PSKS yang berpartisipasi	75%	100%	58,3%	100%

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota seperti Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarmasin PSKS yang aktif di Kota Banjarbaru terealisasi 75% (9 PSKS) dari target nasional 12 PSKS karena masih ada 3 (tiga) PSKS yang belum aktif di Banjarbaru yaitu Keluarga Pioner, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial.

4. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasoinal

Realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 dan Target Nasional tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel. 4.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional
1	Cakupan PSKS yang berpartisipasi	75% (9 PSKS)	12 PSKS	12 PSKS

Capaian Cakupan PSKS yang berpartisipasi terealisasi 75% (9 PSKS) yang aktif dan jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 dan RPJMN 12 PSKS atau persentase sebesar 75%. kategori baik.

Pencapaian Target Nasional yang dilaksanakan dalam pencapaian target dapat dianalisis bahwa indikator Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang direncanakan disamping itu perlu upaya agar potensi kesejahteraan sosial lebih membawa manfaat

5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan

- a. Komitmen Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan aparatnya dalam memberikan pelayanan sosial untuk meningkatkan peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lebih aktif dan inovatif
- b. Meningkatkan koordinas dan kerjasama dengan SKPD terkait seperti Kecamatan, Kelurahan PKK dan Pusyandu Kota Banjarbaru
- c. Bekerjasama dengan kelurahan, tokoh masyarakat dan PKK untuk menggali/mencari PSKS yang belum teridentifikasi pada masing-masing kelurahan.
- d. Peningkatan kualitas dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)
- e. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat sehingga terdorong untuk menjadi relawan sosial (PSM,KT,Tagana, LKS dll)
- f. Bekerjasama dengan Lembaga kesejahteraan sosial (LKS) yayasan milik swasta

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan:

- a. Melakukan Pembinaan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial agar lebih berperan aktif dalam kesejahteraan sosial di Kota Banjarbaru

- b. Mengikuti sertakan bimtek, pelatihan-pelatihan dan sosialisasi yang baik tingkat Kota maupun Provinsi bagi PSKS
- c. Melibatkan dalam pendampingan kegiatan yang dilaksanakan oleh dana APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota Banjarbaru
- d. Monitoring dan evaluasi

Capaian Kinerja Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi dalam pelayanan sosial didukung dengan :

1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
3. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor: 184 Tahun 2011 Tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 68,11% Sedangkan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran indikator Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi adalah Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial, Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat, Pembinaan Karang Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Pengumpulan Pengolahan Data Ekpose dan Pelaporan

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran indikator Cakupan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berpartisipasi tahun 2020 sebesar Rp. 1.164.318.000 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 371.344.500 atau 31,89% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.1

No	Program	Pagu (Rp)	Keuangan	
			Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial			7,80
	➢ Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial	627.410.000	0	0
	➢ Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat	915.000	915.000	100
	➢ Peningkatan Kesejahteraan Sosial Anak di LKSA			

		54.803.500	52.363.500	95,55
2	Program Perlindungan Sosial ➢ Pembinaan Karang Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	121.190.000	110.154.000	90,90
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin , KAT dan PMKS lainnya ➢ Pengumpulan Pengolahan data ekpose dan pelaporan	360.000.000	207.912.000	57,75
TOTAL		1.164.318.000	371.344.500	31,89

Anggaran pelaksanaan program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial realisasi capaian sangat rendah dikarenakan adanya refocusing anggaran

Kegiatan yang tidak terealisasi sebagai berikut :

a. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat

Kegiatan ini adalah kegiatan yang dananya dari Dana Insentif Daerah (DID) yang diserahkan kepada Dinas Sosial Kota Banjarbaru . pada saat anggaran perubahan Tahun 2020.

Kegiatan ini tidak terlaksana dikarenakan :

- Kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan untuk Usaha Ekonomi Produktif (UEP) senilai Rp. 7.000.000 / orang bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) sebanyak 70 KPM
- Jumlah KPM PKH di Kota Banjarbaru berjumlah 4.442 KPM
- Untuk pemberian bantuan UEP hanya 70 KPM dari 4.442 KPM akan menjadi kecemburuan bagi KPM yang lain. Dan pemilihan seleksi untuk menentukan siapa yang berhak menerimanya mengalami kesulitan
- Untuk merealisasikan kegiatan ini waktunya sangat sempit karena pemberian bantuan tidak boleh berupa uang tetapi berupa barang yang pengadaannya harus dengan lelang
- Pemberian modal kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dari Dinas Koperasi ,UMKM dan Naker bisa double (tumpang tindih) datanya dengan usulan dari KPM PKH.

b. Kegiatan Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat

Kegiatan ini tidak terlaksana karena anggaran di refocusing

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KEMANDIRIAN MASYARAKAT DALAM KESEJAHTERAAN SOSIAL

Indikator Kinerja 1 Persentase PMKS yang Mampu Melaksanakan Peran Sosialnya di Masyarakat

Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani dan rohani) secara memadai dan wajar.

Indikator Kinerja Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat dipilih dengan tujuan untuk membantu melayani, membina agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat dan penanganannya secara wajar.

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian Indikator Kinerja Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat diukur berdasarkan perhitungan **Jumlah Jenis PMKS yang mampu melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat dibagi Jumlah Jenis PMKS dikali 100%**.

Tabel 1

Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat	%	59%	61%	103,2%

Indikator Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat pada tahun 2020 terealisasi 61% (14 Jenis PMKS) dari target (23 PMKS). Sedangkan target tahun 2020 sebesar 59 % adalah (13 jenis PMKS dari 22 PMKS) maka capaian kinerja 103,3%

Adapun PMKS yang diberikan pelayanan dan pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru melalui kegiatan Rumah Singgah dan Pendampingan Pekerja Sosial (Peksos) yaitu :

Tabel 2

PMKS yang ditangani Dinas Sosial Kota Banjarbaru

No	Jenis PMKS	Jumlah	Keterangan
1	Anak Balita Terlantar	1 Orang	Penanganan kepada anak balita terlantar yang akan diadopsi oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) dengan pendampingan oleh Sakti Peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru sampai mendapatkan hak asuh dari Pengadilan

2	Anak Terlantar	1 Orang	Terlantar
3	Anak Jalanan	1 Orang	Pendampingan oleh Sakti Peksos kepada Anak Punk yang terjaring Razia di Buntok
4	Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)	7 Orang	Pendampingan oleh Sakti Peksos kepada anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan kepada Anak yang terlibat kasus kriminal yang berhadapan dengan hukum antara lain : a. Kasus Napza dilakukan dengan pendampingan oleh sakti Peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada saat Diversi di Sat Res Narkoba Polres Kota Banjarbaru sebanyak 4 orang b. Kasus Penganiayaan/perkelahian dilakukan dengan pendampingan oleh sakti Peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada saat Diversi di Unit PPA Polres Kota Banjarbaru sebanyak 1 orang c. Kasus Tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan dilakukan dengan pendampingan kepada klien oleh sakti peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebanyak 1 orang d. Kasus Eksploitasi Seksual 1 orang
5	Anak dengan Kedisabilitas	15 Orang	Anak Dengan Kecacatan berat pada anak yang tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang dibantu dengan anggaran yang bersumber dari APBD berupa paket permakanan sebanyak 15 orang
6	Lanjut Usia Terlantar	90 Orang 8 Orang 6 orang	a. Lanjut Usia terlantar adalah lanjut usia diluar panti yang dibantu diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendampingan oleh home care dan diberikan paket sembako sebanyak 90 orang se Kota Banjarbaru melalui anggaran APBD Kota Banjarbaru b. Lanjut usia terlantar yang dibantu dari anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berupa alat bantu yaitu Wolker (Tongkat kaki empat) dan Tripot (Tongkat kaki tiga) sebanyak 8 orang c. Pendampingan Pemulangan ke daerah asal
7	Penyandang Disabilitas	3 Orang 11 Orang 40 Orang	a. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diberikan pelayanan dengan memberikan rekomendasi rujukan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Priovinsi Kalimantan Selatan untuk direhabilitasi agar pulih kesehatan mentalnya sebanyak 1 orang . dan 2 orang dipulangkan ke tempat asalnya/di jemput keluarganya b. Cacat Fisik atau Tuna Daksa yang dibantu mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan diberikan kursi roda sebanyak 5 orang, Tongkat 6 orang bantuan CSR (TNI AURI Syamsuddin Noor) c. Bantuan dari anggaran APBN - Bantuan dari Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp. 2.000.000 per tahun sebanyak 30 org - Bantuan dari Balai BRSPDSN Wiyata Guna Bandung sebesar Rp.2000.000 per tahun sebanyak 10 orang
8	Wanita Tuna Susila	22 Orang 7 Orang 3 Orang	PSK yang terjaring razia Satpol PP yang dilayani pendampingan di Rumah Singgah sampai yang bersangkutan menjalani persidangan di Pengadilan Pembinaan kepada anak kasus Kenakalan Remaja (Prostitusi online) Pembinaan kepada para laki-laki Hidung Belang dan selanjutnya mengikuti persidangan
9	Gelandangan	2 Orang	Pendampingan pemulangan ke Kab. Tanah Bumbu dan Kab.Hulu Sungai Tengah
10	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	1 Orang	Pelayanan dan pembinaan kepada orang-orang bekas warga binaan lembaga pemsarakatan dengan dibantu pemulangan ke daerah asal yaitu Ke Provinsi Sulawesi Tengah
11	Korban Penyalahgunaan Napza	4 Orang	Pendampingan pekerja sosial kasus narkoba
12	Korban Trafficking	1 Orang	Korban perdagangan anak atau korban eksploitasi ekonomi / Seksual
13	HIV/AIDS	1 Orang	Pendampingan pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
14	Orang Terlantar	15 Orang	Pendampingan Pemulangan orang terlantar ketempat asalnya

Adapun yang dapat mendukung penanganan PMKS di Kota :

a. Berdirinya rumah singgah untuk penampungan sementara bagi PMKS

- b. Komitmen Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan aparatnya dalam memberikan pelayanan sosial untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial
- c. Adanya pembinaan yang dilakukan oleh petugas Dinas Sosial bekerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan, Satpol PP, Dinas Capil dan Kepolisian
- d. Adanya bantuan permakanan bagi penyandang disabilitas
- e. Sosialisasi kepada masyarakat

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Indikator Kinerja Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat dua tahun terakhir sebagai berikut

Tabel 2.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat	59%	59%	68%	68%	61%	61%

Pencapaian indikator Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat dua tahun terakhir pada tahun 2018 penanganan PMKS terealisasi 59% (13 jenis PMKS), pada tahun 2019 ada kenaikan terealisasi 68% (15 jenis PMKS) dan pada tahun 2020 terealisasi 61% (14 jenis PMKS).

Adapun yang mempengaruhi pencapaian realisasi adalah Pada tahun 2018 belum dibangunnya rumah singgah untuk penampungan sementara bagi PMKS sedangkan pada tahun 2019 dan tahun 2020 pelayanan dan pembinaan kepada PMKS dapat dilaksanakan dengan lebih baik karena sudah adanya sarana dan prasarana rumah singgah yang digunakan sebagai penampungan sementara bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

3. Perbandingan kinerja dengan Kabupaten /Kota /Provinsi

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) skala Kabupaten/Kota/Propivinsi dilaksanakan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Tabel 3

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi			
			Kab. Banjar	Kab. Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Propinsi Kalimantan Selatan
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat	61%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan capaian kinerja dalam penanganan PMKS Kabupaten/ Kota/Provinsi tidak sama walaupun jenis PMKS yang ditangani sama sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial.

Untuk Kota Banjarbaru terealisasi 61% (14 jenis PMKS) itu adalah PMKS yang ditangani Dinas Sosial Kota Banjarbaru yang masuk di rumah singgah dan pendampingan oleh Peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru

4. Perbandingan Realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Tabel 4.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional Tahun 2020
1	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat	61% PMKS	68%	26 PMKS (100%)

Realisasi capaian kinerja pada tahun 2020 terealisasi 61% (14 Jenis PMKS) sedangkan target RPJMD tahun 2021 sebanyak 68% 15 jenis PMKS) Itu dikarenakan PMKS yang ditangani atau yang dilayani dan diberikan pembinaan adalah PMKS yang masuk di rumah singgah.dan Target Nasional 26 PMKS capaian 53,8 %

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam penanganan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

- a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait penanganan PMKS Kabupaten/Kota

- b. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikutkan Pelatihan di Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan.
- c. Dibangunnya rumah singgah sebagai tempat penampungan sementara bagi PMKS
- d. Adanya Sakti Peksos Penanganan Anak dan Peksos Disabilitas Kementerian Republik Indonesia
- e. Adanya pramu sosial yang membantu klien yang masuk di rumah singgah baik itu hasil razia Satpol PP ataupun dari rujukan Kepolisian
- f. Tersedianya sarana dan prasarana operasional yang memadai

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan :

- a. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam penanganan PMKS seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru, Disduk Capil, RSD Idaman, RSJ Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan, Kepolisian, Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial Kabupaten / Kota.
- b. Melaksanakan Pembinaan kepada pramu dirumah singgah
- c. Monitoring dan Evaluasi

6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 44,75% Sedangkan program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran indikator Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi anak terlantar dan keluarga miskin, Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran indikator indikator Persentase PMKS yang mampu melaksanakan

peran sosialnya di masyarakat sebesar Rp. 313.656.200 dampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 173.310.700 atau 55,25 % dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.1

No	PROGRAM	PAGU (Rp)	KEUANGAN	
			Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya > Pendidikan dan Pelatihan bagi anak terlantar dan Keluarga miskin	85.257.500	15.349.500	18,00
2	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)	228.398.700	157.961.200	69,16
Total		313.656.200	173.310.700	55,25

Indikator Kinerja 2

Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan untuk Mendukung Pelaksanaan Peran Sosialnya sesuai Ketentuan

Masyarakat yang mendapatkan bantuan adalah masyarakat Kota Banjarbaru yang diberikan bantuan sesuai ketentuan yang sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru.. Pelaksanaan Tali Asih Kepada Masyarakat ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 058 Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Petugas Pemberian Santunan Tali Asih Paket Lebaran Kepada Masyarakat Kota Banjarbaru Tahun 2020. Dan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/189/KUM/2020 tentang Pemberian Paket Sembako kepada Veteran dan Janda Veteran Kota Banjarbaru Tahun 2020 Adapun bantuan yang diberikan untuk masyarakat adalah Pemberian Santunan Tali Asih dan Pemberian Sembako kepada Veteran dan Janda Veteran.

Indikator Kinerja Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan untuk Mendukung Pelaksanaan Peran Sosialnya sesuai Ketentuan dipilih untuk memberikan tali asih kepada masyarakat sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota.Banjarbaru

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Indikator Kinerja Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Bantuan untuk Mendukung Pelaksanaan Peran Sosialnya sesuai Ketentuan diukur

berdasarkan perhitungan **Jumlah Masyarakat yang mendapatkan bantuan dibagi jumlah Sembako yang tersedia dikali 100%**

Tabel 1.

Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	Orang	100%	99,97%	99,97%

Indikator persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan pada tahun 2020 terealisasi. 99,97% dengan kategori baik

Pelaksanaan pemberian santunan tali asih terealisasi 99,97% (3.607 orang) dari target 100% karena anggota Veteran dan Janda Veteran ada yang meninggal dunia. satu orang

Pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat adalah bantuan Tali Asih kepada masyarakat berupa permakanan/sembako. Pelaksanaan Tali Asih Kepada Masyarakat ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 058 Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Petugas Pemberian Santunan Tali Asih Paket Lebaran Kepada Masyarakat Kota Banjarbaru Tahun 2020. Dan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/189/KUM/2020 tentang Pemberian Paket Sembako kepada Veteran dan Janda Veteran Kota Banjarbaru Tahun 2020. Dengan dasar itu pelaksanaan pemberian tali asih berupa peranakan/sembako kepada masyarakat dapat dilaksanakan pemberian tali asih diberikan adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat dengan sasaran antara lain Pertuni, BKPRMI, YKTN, Sopir pelajar, Kaum , pasukan kuning dan lain-lain di wilayah Kota Banjarbaru sedangkan paket sembako untuk Veteran dan Janda Veteran diberikan pada saat Hari Pahlawan tanggal 10 Nopember 2020.

1. Pemberian Tali Asih Kepada Masyarakat

Tabel 2
Data Penerima Tali Asih Kota Banjarbaru

No	Penerima	Jumlah	Ket
1	RT/ RW, Tokoh masyarakat Tokoh Agama se Kota Banjarbaru	917 orang	
2	Pertuni	47 orang	
3	BKPRMI	400 orang	
4	Perkim	156 orang	
5	Veteran dan janda veteran	112 orang	
6	Pasukan Kuning	529 orang	
7	Rumah Ibadah	120 orang	
8	LPM	38 orang	
9	Pemko	25 orang	
10	Relawan	746 orang	
11	YKTN	46 orang	
12	Pasar Ulin Raya	104 orang	
13	Sopir Pelajar	157 orang	
14	PKK	60 orang	
15	Pasar Bauntung	22 orang	
16	Pers Room	21 orang	
	Jumlah	3.500 orang	

Sumber data Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

2. Pemberian Tali Asih Kepada Veteran dan Janda Veteran

Pemberian Tali Asih kepada anggota Veteran dan Janda Veteran dilaksanakan pada saat Hari Pahlawan 10 November 2020 dengan rekapitulasi :

- Veteran PKRI : 3 orang
- Veteran Pembela : 48 orang
- Janda Veteran PKRI : 35 orang
- Janda Veteran Pembela : 21 orang

Tabel 3
Data Penerima Tali Asih Veteran dan Janda Veteran

No	Kecamatan	Jumlah	Ket
1	Kec. Liang Anggang	6 orang	
2	Kec. Landasan Ulin	33 orang	
3	Kec. Banjarbaru Selatan	15 orang	
4	Kec. Banjarbaru Utara	48 orang	
5	Kec. Cempaka	5 orang	
	Jumlah	107 orang	

Sumber Data Bidang Pemberdayaan Sosial

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Pada tahun 2020 pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat dapat terealisasi dengan baik . Realisasi Capaian kinerja 2 tahun terakhir dapat dilihat seperti tabel berikut ini :

Tabel.2

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	3.608 paket	100%	3.608 paket	99,9%	3.607 paket	99,97%

indikator kinerja Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan untuk tahun 2018 terealisasi 100% dan 2019 dan Tahun 2020 terealisasi 99,97 % karena penerima dari anggota Veteran dan Janda veteran ada yang meninggal dunia.

Dilihat dari hasil pencapaian bahwa pelaksanaan pemberian bantuan kepada masyarakat untuk pelaksanaan peran sosial sesuai ketentuan

Dari realisasi capaian kinerja tahun 2020 dapat dianalisis bahwa indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya dapat terlaksana sesuai target yang direncanakan karena :

1. Masyarakat penerima bantuan adalah masyarakat Kota Banjarbaru
2. Masyarakat yang dapat bantuan sesuai ketentuan sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kota Banjarbaru Nomor 058 Tahun 2020 tanggal 06 Januari 2020 tentang Penunjukan Petugas Pemberian Santunan Tali Asih Paket Lebaran Kepada Masyarakat Kota Banjarbaru Tahun 2020. Dan Surat Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/189/KUM/2020 tentang Pemberian Paket Sembako kepada Veteran dan Janda Veteran Kota Banjarbaru Tahun 2020
3. Pembagian dilaksanakan tepat waktu sesuai jadwal yang direncanakan

3. Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten /Kota/Provinsi

Pemberian bantuan Kabupaten /Kota /Provinsi sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah masing-masing dalam memberikan bantuan tali asih kepada masyarakat berbeda-beda misalkan Kota Banjarbaru dalam memberikan bantuan tali asih kepada masyarakat di saat menjelang lebaran

dan kepada para veteran dan janda veteran diserahkan pada saat Hari Pahlawan . Untuk bahan perbandingan tidak ada.

Tabel 3
Perbandingan Kinerja dengan Kabupaten /Kota/Provinsi

No	Indikator Kinerja	Realisasi				
		Realisasi 2020	Kab. Banjar	Kab.Tanah Laut	Kota Banjarmasin	Provinsi Kalsel
	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	100%	-	-	-	-

4. Perbandingan realisasi dengan target RPJMD dan Nasional

Realisasi kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 masih sama dengan target tahun 2020 .sedangkan dibandingkan dengan target Nasional tidak ada

Tabel 4.
Perbandingan Target RPJMD dan Nasional

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Target RPJMD 2021	Target Nasional RPJMN Tahun 2020
	Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	3.608	3.610	---

Dari tabel dijelaskan bahwa pelaksanaan pemberian bantuan pada tahun 2020 terealisasi 3.608 paket dari target 3.610 paket atau 99,9 % dikarenakan anggota veteran dan janda veteran meninggal dunia sedangkan target RPJMD tahun 2021 direncanakan 3.610 paket dan target RPJMN tidak ada.

1. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam melaksanakan Pemberian Tali asih kepada masyarakat dengan cara :

1. Melaksanakan Pendataan Ulang agar tepat sasaran
2. Berkoordinasi dengan Kecamatan dan Kelurahan se Kota Banjarbaru
3. Data Penerima bantuan orang Banjarbaru
4. Pemberian bantuan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Keputusan Walikota Banjarbaru

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dan Program Penunjang

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 15% Sedangkan program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran indikator Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat adalah Program Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya dengan kegiatan Santunan Tali Asih Kepada masyarakat dan Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan dengan kegiatan Pembinaan Veteran dan Janda Veteran

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran indikator Persentase masyarakat yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan sebesar Rp. 517.306.000 sampai dengan akhir tahun teral direalisasikan sebesar Rp. 439.681.250 atau. 439.681.250% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.1

No	PROGRAM	PAGU (Rp)	KEUANGAN	
			Realisasi	%
1	Program Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya ➢ Santunan Tali Asih Kepada Masyarakat	464.500.000	392.564.750	84,50
2	Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Penanaman Nilai-nilai Kepahlawanan serta Kesetiakawanan ➢ Pembinaan Veteran dan Janda Veteran	52.806.000	47.116.500	89,23
	Total	517.306.000	439.681.250	85%

Indikator 3.

Persentase PMKS yang Mendapatkan Bantuan Untuk Mendukung Pelaksanaan Peran Sosialnya sesuai Ketentuan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seorang keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani dan rohani) secara memadai dan wajar.

Indikator Kinerja Persentase PMKS yang mendapat bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan dipilih dengan

tujuan untuk membantu melayani, membina dan memberdayakan agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di masyarakat

1. Capaian Kinerja Tahun 2020

Capaian Kinerja Indikator Persentase PMKS yang Mendapatkan Bantuan Untuk Mendukung Pelaksanaan Peran Sosialnya sesuai Ketentuan diukur berdasarkan perhitungan **Jumlah Jenis PMKS yang mendapat bantuan dibagi Jumlah Jenis PMKS dikali 100%.**

Tabel 1

Indikator Kinerja	Satuan	Uraian Kinerja Tahun 2020		
		Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Persentase PMKS yang mendapat bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	%	95%	78,3%	82,4%

Realisasi Persentase PMKS yang mendapat bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan. Tahun 2020 terealisasi 78,3% (18 Jenis PMKS) dari target 95% (21 Jenis PMKS) dengan capaian kinerja 82,4%.

Indikator Kinerja Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapat bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan ada 18 jenis PMKS yang sudah diberikan pelayanan, pembinaan dan bantuan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru dan Pendampingan Pekerja Sosial (Peksos) yaitu :

1. Anak Balita Terlantar

Penanganan kepada anak balita terlantar yang akan diadopsi oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) dengan pendampingan oleh Sakti Peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru sampai mendapatkan hak asuh dari Pengadilan sebanyak 1 orang

2. Anak Terlantar

Anak terlantar yang ditangani dibantu sebanyak 1 orang

3. Anak Jalanan

Pendampingan oleh Sakti Pekerja sosial kepada Anak Punk yang terjaring Razia di Buntok sebanyak 1 orang

4. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH)

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan kepada Anak yang terlibat kasus kriminal yang berhadapan dengan hukum antara lain :

- a. Kasus Napza dilakukan dengan pendampingan oleh sakti Peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada saat Diversi di Sat Res Narkoba Polres Kota Banjarbaru sebanyak 4 orang
 - b. Kasus Penganiayaan/perkelahian dilakukan dengan pendampingan oleh sakti Peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru pada saat Diversi di Unit PPA Polres Kota Banjarbaru sebanyak 1 orang
 - c. Kasus Tindak pidana penadahan barang hasil kejahatan dilakukan dengan pendampingan kepada klien oleh sakti peksos Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebanyak 1 orang
 - d. Kasus Eksploitasi Seksual 1 orang
5. Anak Dengan Kedisabilitas
- Anak Dengan Kecacatan berat pada anak yang tidak mampu dan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar yang dibantu dengan anggaran yang bersumber dari APBD berupa paket permakanan sebanyak 15 orang
6. Lanjut Usia Terlantar
- a. Lanjut Usia terlantar adalah lanjut usia diluar panti yang dibantu diharapkan mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dengan pendampingan oleh home care dan diberikan paket sembako orang se Kota Banjarbaru melalui anggaran APBD Kota Banjarbaru sebanyak 90 orang
 - b. Lanjut usia terlantar yang dibantu dari anggaran Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan berupa alat bantu yaitu Wolker (Tongkat Kaki Empat) dan Tripot (Tongkat kaki Tiga) sebanyak 8 orang
 - c. Lanjut Usia terlantar yang dibantu pemulangan ke daerah asal sebanyak 6 orang
7. Penyandang Disabilitas

- a. Cacat Fisik atau Tuna Daksa yang dibantu mampu melaksanakan fungsi sosialnya dengan diberikan kursi roda sebanyak 5 orang, Tongkat 6 orang bantuan CSR (TNI AURI Syamsuddin Noor)
 - b. Bantuan dari anggaran APBN sebanyak 40 orang Bantuan dari Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas (ASPD) sebesar Rp. 2.000.000 per tahun sebanyak 30 org
 - c. Bantuan dari Balai BRSPDSN Wiyata Guna Bandung sebesar Rp.2000.000 per tahun sebanyak 10 orang
8. Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
diberikan pelayanan dengan memberikan rekomendasi rujukan berobat ke Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan untuk direhabilitasi agar pulih kesehatan mentalnya sebanyak 1 orang . dan 2 orang dipulangkan ke tempat asalnya / di jemput keluarganya
9. Wanita Tuna Susila
- a. PSK yang terjaring razia Satpol PP yang dilayani pendampingan di Rumah Singgah sampai yang bersangkutan menjalani persidangan di Pengadilan sebanyak 22 orang
 - b. Pembinaan kepada anak kasus Kenakalan Remaja (Prostitusi online)
 - c. Pembinaan kepada para lelaki hidung belang dan selanjutnya mengikuti persidangan
10. Gelandangan
Pendampingan pemulangan ke Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten sebanyak 2 orang
- 11 . Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan
Pelayanan dan pembinaan kepada orang orang Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan dengan dibantu pemulangan ke daerah asal yaitu Ke Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 1 orang
- 12 . Korban Penyalahgunaan Napza
Pendampingan Pekerja Sosial kasus Narkoba sebanyak 4 orang
- 13 . Korban Trafficking

Korban perdagangan anak atau korban eksploitasi ekonomi/Seksual sebanyak 1 orang

14 . HIV/AIDS

Pendampingan Pemeriksaan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru sebanyak 1 orang

15 . Orang Terlantar

Pendampingan Pemulangan orang terlantar ketempat asalnya sebanyak 15 orang

16 Korban Bencana Alam

Pemberian bantuan kepada korban bencana alam yaitu Korban banjir di Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka dengan memberikan permakanan dengan membuka dapur umum lapangan bekerjasama dengan masyarakat setempat dan aparat kelurahan, Babinsa dan Babinkamtibmas

17 Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Pemberian Pelatihan Pembuatan Kue yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru sebanyak 20 orang

18 . Fakir Miskin

Fakir Miskin yang mendapatkan bantuan berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

- Yang mendapatkan dari Program Sembako 7.768 KPM
- Bantuan Sosial Tunai 3.559 KPM

2. Perbandingan Kinerja 2 Tahun Terakhir

Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan untuk 2 tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.

No	Indikator Kinerja	Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020	
		Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian	Realisasi	Capaian
1.	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	91%	91%	95%	95%	78,3%	78,3%

Capaian Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan tahun 2018 terealisasi 91% (20 jenis

PMKS), tahun 2019 terealisasi 95% (21 jenis PMKS) dan pada tahun 2020 terealisasi 78,3% (18 jenis PMKS)

Tahun 2020 ada penurunan penanganan PMKS dikarenakan :

- a. Rumah Singgah yang digunakan untuk penampungan sementara bagi PMKS ditutup mulai bulan Maret 2020 sampai dengan Desember 2020 dikarenakan Pandemi Covid 19.
- b. Adanya refocusing anggaran

3. Perbandingan dengan Kabupaten /Kota/ Provinsi

Kota Banjarbaru dalam penanganan PMKS jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota/Provinsi dibandingkan dengan Kota Banjarbaru sebagai berikut :

Tabel.3

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2020	Realisasi Kabupaten Banjar	Realisasi Kabupaten Tanah Laut	Realisasi Kota Banjarmasin
1	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	78,3%	100%	100%	100%

Indikator kinerja Persentase PMKS Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan bahwa PMKS yang mendapatkan bantuan terealisasi 78,3% dan jika dibandingkan dengan Kabupaten /Kota yang bantuannya sudah mencakup 100% itu dikarenakan untuk tahun 2020 masih ada 3 (tiga) jenis PMKS yang belum ada di Kota Banjarbaru yaitu Kelompok Minoritas, Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT).

4. Perbandingan realisasi dengan Target RPJMD dan Nasional

Realisasi capaian kinerja Dinas Sosial Kota Banjarbaru dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2021 dan target Nasional Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 4.

No	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2020	Target RPJMD Tahun 2021	Target Nasional Tahun 2020
1	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan	78,3%	68%	26 PMKS

Indikator Kinerja Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan pada tahun 2020 terealisasi 78,3% .

Jika dibandingkan dengan target RPJMD tahun 2021 yang mana target 68% sudah melebihi target

Dan jika dibandingkan dengan target Nasional RPJMN 26 Jenis PMKS atau 69,23%

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan

Pencapaian Indikator Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan untuk mendukung pelaksanaan peran sosialnya sesuai ketentuan dapat terlaksana didukung dengan :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional dalam melaksanakan layanan kepada PMKS melalui Pelatihan teknis di Balai Besar Pendidikan dan pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Regional IV Kalimantan
2. Adanya tenaga Pekerja Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk tenaga pendampingan anak dan tenaga pendampingan penyandang disabilitas
3. Tersedianya sarana dan prasarana operasional lapangan untuk pelayanan kepada PMKS
4. Sudah dibagunnya rumah singgah untuk penampungan sementara bagi PMKS.

Langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan:

- a. Melaksanakan pembinaan kepada PMKS yang terjaring razia Satpol PP.
- b. Bekerjasama dengan Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) Griya Pemberdayaan khusus penanganan Napza bagi anak yang ketergantungan obat sampai sembuh.
- c. Bekerjasama dengan Kepolisian, Dinas Daldul Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan dan Pengadilan untuk

Pendampingan kepada Anak yang berhadapan dengan Hukum oleh Pekerja Sosial pada Dinas Sosial Kota Banjarbaru

- d. Bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan dan Tim Pemberi Ijin Pengangkatan Anak (PIPA) oleh Pekerja Sosial dalam Pendampingan Pengangkatan Anak/Adopsi

6. Efisiensi penggunaan sumber daya dan program pendukung

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pencapaian target terutama dari segi anggaran telah dilakukan. Efisiensi atas penggunaan anggaran tersebut adalah sebesar 23,97%. Sedangkan program yang mendukung dalam pencapaian kinerja sasaran indikator Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat adalah Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi anak terlantar dan keluarga miskin.

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dengan kegiatan Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA), Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba, Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan Pengemis dan Orang Terlantar, Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan eks Trauma

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) dengan kegiatan Pengelolaan Rumah Singgah

Program Perlindungan Sosial dengan kegiatan Pendampingan Program Keluarga Harapan dan Penyaluran pangan bagi Masyarakat Miskin.

B. REALISASI ANGGARAN

Berdasarkan pagu anggaran program untuk mendukung terealisasinya sasaran indikator indikator Persentase PMKS yang mampu melaksanakan peran sosialnya di masyarakat sebesar Rp. 592.057.200 sampai dengan akhir tahun telah direalisasikan sebesar Rp. 450.171.700 atau 76,03% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel B.1

No	PROGRAM	PAGU (Rp)	KEUANGAN	
			Realisasi (Rp)	%
1	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya ➤ Pendidikan dan Pelatihan bagi anak terlantar dan keluarga miskin	85.257.500	15.349.500	18,00
2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ➤ Pembinaan dan Rehabilitasi Para Lanjut Usia (LANSIA) ➤ Penjangkauan Penyalahgunaan Narkoba ➤ Pembinaan dan Rehabilitasi Para Gelandangan Pengemis dan Orang Terlantar ➤ Pendayagunaan Para Penyandang cacat dan eks Trauma	56.886.000 0 1.000.000 30.965.000	56.346.000 0 0 30.965.000	99,05 0 0 100
3	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya) ➤ Pengelolaan Rumah Singgah	228.398.700	157.961.200	69,16
4	Program Perlindungan Sosial ➤ Pendampingan Program Keluarga Harapan ➤ Penyaluran Pangan bagi Masyarakat Miskin	178.840.000 10.710.000	178.840.000 10.710.000	100 100
Total		592.057.200	450.171.700	76,03

KEGIATAN PENUNJANG

Adapun Kegiatan penunjang yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan pencapaian indikator kinerja tahun 2020 antara lain :

1. Kegiatan Pendampingan kepada Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perorangan yang ada di Kecamatan Banjarbaru Selatan 5 orang, Kecamatan Cempaka 10 orang dan Kecamatan Landasan Ulin 6 orang. bekerjasama dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan masing-masing kecamatan 1 (satu) pendamping
2. Kegiatan Pendampingan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui Program Keluarga Harapan
3. Pendampingan kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ditangani melalui kegiatan reunifikasi keluarga
4. Pendampingan kepada PMKS untuk mendapatkan dokumen kependudukan / data diri bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Program dan kegiatan telah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru selama 1 tahun banyak hal yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi. Kendala dan hambatan yang dihadapi senantiasa menjadi cambuk untuk meningkatkan kinerja ke arah yang lebih baik.

Meskipun disusun secara sederhana Laporan Kinerja tahun 2019 ini diharapkan mampu membangun kebersamaan sekaligus menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Berikut permasalahan yang masih harus dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Banjarbaru diharapkan agar ke depannya bisa dapat teratasi, di antaranya :

1. Capaian kinerja Indikator Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial masih rendah belum tumbuh secara maksimal
2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam upaya penanganan peningkatan kesejahteraan sosial diantaranya kurangnya kemampuan masyarakat miskin untuk mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan bidang pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.
3. Terbatasnya sarana dan prasarana operasional yang memadai
4. Terbatasnya ketersediaan data yang akurat sebagai bahan penyusunan laporan kinerja .

4.2 Langkah dimasa datang

Dari permasalahan yang telah diuraikan di atas, selanjutnya ada beberapa langkah untuk mengatasi permasalahan yang ada selama ini. Akan tetapi hal ini tidak akan terwujud apabila tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik, oleh karena itu diharapkan dukungan dan kerjasama dari Pemerintah dan Instansi yang terkait dalam penanganan masalah bidang sosial

Perlu Penanganan terpadu oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing..Perlu inovasi program dan kegiatan pada Dinas Sosial khususnya Pemerintah Kota Banjarbaru.

1. Sudah dibangunnya rumah singgah sebagai penampungan sementara bagi Penyandang Masalah kesejahteraan Sosial (PMKS)
2. Meningkatkan pelayanan, pembinaan dan rehabilitasi sosial kepada masyarakat terutama para Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan memberikan kemudahan dalam mengakses sumber-sumber kesejahteraan sosial antara lain kesejahteraan pendidikan, kesehatan dan sumber lainnya.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam penanganan PMKS (Satpol PP, Dinas Kesehatan, BPJS, dan RSJ Sambang Lihum)
5. Mengoptimalkan Sumber Daya Manusia yang ada dengan melakukan bimbingan teknis agar adanya peningkatan kemampuan SDM dalam menangani permasalahan sesuai dengan bidang keahliannya dan mengajukan penambahan sarana dan prasarana dalam menunjang kinerja aparat.
6. Penanganan PMKS lebih mengacu kepada data terpadu Dinas Sosial Kota Banjarbaru
7. Penambahan sarana dan prasarana operasional untuk menunjang kegiatan